

ABSTRAK

M. Gianola Noor Habibie. *Sistem Pendistribusian Gas LPG Bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.* Skripsi. Pembimbing: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Pendistribusian, LPG Bersubsidi, Hukum Ekonomi Syariah, *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendistribusian LPG bersubsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. LPG bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Namun, dalam praktiknya pendistribusian LPG bersubsidi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap pangkalan, cepat habisnya stok, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, serta belum meratanya pengendalian distribusi pada setiap wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pemilik pangkalan LPG bersubsidi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua RT, masyarakat sebagai konsumen rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan sopir pengangkut LPG bersubsidi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sistem pendistribusian LPG bersubsidi serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara pada dasarnya dilakukan melalui jalur resmi, yaitu dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kepada agen, kemudian disalurkan kepada pangkalan, dan selanjutnya diterima oleh konsumen akhir. Dalam praktiknya, salah satu pangkalan menerapkan sistem kartu kendali untuk mengatur pembelian LPG bersubsidi agar lebih merata kepada warga di wilayah RT setempat. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam pendistribusian LPG bersubsidi, yaitu keterbatasan akses masyarakat terhadap pangkalan, cepat habisnya stok LPG, keterlambatan distribusi, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, serta belum seragamnya pengendalian distribusi pada setiap wilayah. Kendala tersebut menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha mikro harus membeli LPG melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian LPG bersubsidi perlu memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, ketepatan sasaran, dan kemaslahatan agar manfaat subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.